

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk menjaga semangat kerja, profesional, dan loyalitas pegawai negeri, pemerintah memberikan berbagai bentuk kompensasi yaitu secara finansial. Bentuk kompensasi finansial itu adalah Tujuan Penghasilan Pegawai (TPP), yang di berikan sebagai tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pemberian Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ini dimaksudkan untuk Meningkatkan kuliatas kinerja pegawai dan meningkatkan motivasi kerja para pegawai, mendorong kedisiplinan, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap beban kerja dan tanggung jawab yang telah di bebaskan kepada pegawai.(Soemarso, 2011)

Secara umum, kebijakan pemerintah untuk memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) telah di atur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019), Yang memberikan kekuasaan kepada kepala daerah untuk menetapkan tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan pertimbangan kinerja pegawai, lokasi pegawai bertugas, kondisi kinerja, dan kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut, ketentuan ini di implementasikan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur, seperti yang telah di tulis (Dalam Peraturan Gubernur Jambi Tahun 3 Tahun., 2022). Dalam regulasi tersebut diatur mengenai besaran TPP, mekanisme pemberian, hingga indikator penilaiannya.

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) memang dimaksudkan untuk mendorong kinerja pegawai, namun implementasinya masih menemui berbagai kendala. Penelitian oleh (Harahap, A., Simanjuntak, 2020) menunjukkan bahwa masih ada ketidakcocokan antara besaran tunjangan dan kinerja pegawai yang sebenarnya. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakcocokan ini adalah integrasi data kepegawaian yang belum sempurna, sistem penilaian kinerja yang kurang kuat, serta data kehadiran dan pelaporan yang masih belum akurat.

Selain itu, Menurut (Fitriani, 2021) dalam jurnal nya yang berjudul implementasi sistem informasi dalam pengelolaan TPP, pemanfaatan sistem informasi yang belum memadai juga memperlambat proses verifikasi dan pencairan tunjangan. Padahal, pengguna sistem digital juga sangat penting untuk menunjukkan efesien, akuntabilitas, dan transparan. Menurut (Sedarmayanti, 2017) dalam bukunya yang berjudul manajemen

SDM dan produktivitas kerja, juga menegaskan bahwa sistem kompensasi harus di susun berdasarkan prinsip keadilan dan kinerja, karena tunjangan yang tidak sesuai dengan kinerja para pegawai yang dapat menurunkan semangat dan motivasi pegawai. Hal ini juga sama di kemukakan oleh (Siagian, 2005) dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia, yang menyatakan bahwa sistem imbalan yang efektif adalah strategi yang paling penting untuk memanajemen sumber daya manusia dalam sektor publik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi peran penting untuk membenahi sistem birokrasi dan membangun budaya kerja berbasis kinerja. Dalam sistem modern, orientasi terhadap hasil untuk menjadi fokus utama, untuk pemberian penerapan TPP di harapan mampu mengubah perilaku kerja pegawai agar lebih bertanggung jawab, inovasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Hal ini juga dapat sejalan dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan.(Siagian, 2005)

Namun demikian, keefektivitas dari pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) masih sangat bergantung dengan pada implementasi prosedur yang berlaku. Jika pelaksanaan prosedur tidak terlaksanakan secara konsisten, maka tujuan Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ini tidak akan pernah tercapai secara optimal. Evaluasi yang bertahap terhadap pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), serta memberikan pelatihan kepada Pegawai Negara Sipil (PNS) yang mengelola tugas ini, menjadi kuci utama untuk memperbaiki kekurangan yang ada. (Sedarmayanti, 2017)

Teknologi juga mempunyai peran penting dalam pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (PNS) untuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan dan tidak hanya itu teknologi juga untuk penilaian kinerja secara terhubung. Teknologi digital juga dapat memastikan transparan dalam pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Penggunaan aplikasi seperti E-kinerja dan Sistem Absensi Otomatis (SIABON) dapat mempermudah pegawai dalam pengajuan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan absensi juga meminimalisir kesalahan input data, serta meningkatkan transparansi dalam setiap administrasi. Selain itu, pengguna aplikasi tersebut untuk infrastruktur digital dan memastikan seluruh pegawai terlatih dalam penggunaanya. (Siagian, 2005)

Pengembangan sistem pengawasan yang lebih baik menjadi hal yang sangat sensitif. Dan dalam hal ini penerapan pengawasan dilakukan secara ketat dan di dukung atau berkolaborasi dengan teknologi supaya mempermudah untuk potensi menemukan penyalahgunaan dan kesalahan input data dalam proses pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sistem yang transparan ini sangat menguntungkan pegawai.(fitriani, 2021)

Pentingnya penerapan sistem teknologi akan menjadi lebih baik dan terstruktur tidak hanya terfokus satu titik saja seperti peningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga membuat perubahan tata cara kerja yang lebih professional dan berbasis teknologi. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tepat sasaran dapat diharapkan untuk membentuk pegawai yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas -tugas pemerintah serta memotivasi mereka supaya berinovasi dami pelayanan publik. (Harahap, A., Simanjuntak, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan yang berjudul **“Prosedur Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan rumus masalah pokok laporan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di DPMPTSP Provinsi Jambi?
3. Apakah penggunaan sistem yang diterapkan dalam proses pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) telah berjalan secara efektif dan efisien?

1.3 Tujuan dan manfaat penulis

1.3.1 Tujuan penulis

Berdasarkan masalah pokok dalam kegiatan magang yang telah dilakukan, maka tujuannya dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Tunjangan Pegawai (TPP).
2. Untuk mengetahui apakah di DPMPTSP sering menghadapi kendala dalam pemberian TPP ini.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan sistem teknologi di DPMPTSP Provinsi Jambi telah efisien dan baik.

1.3.2 Manfaat Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membacanya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Laporan ini bisa dapat menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam mengevaluasi dan menyempurnakan prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

2. Bagi penulis

Sebagai pemenuhan salah satu syarat sidang pada Program Akuntansi Program Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan menambah wawasan tentang instansi pemerintahan. Dan kegiatan magang ini menambah pemahaman tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Bagi pembaca

Laporan ini bisa diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai alur dan mekanisme Pemberian Tunjangan Pegawai (TPP). Selain itu juga bermanfaat sebagai referensi untuk memahami prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Metode Penelitian

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung atau melalui pegawai instansi tersebut melalui wawancara dan pengamatan secara langsung di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (Sugiyono, 2013)

2. Data sekunder

Data skunder ini merupakan data yang di cari melalui media prantara atau secara tidak langsung seperti melalui buku dan internet.(Nazir, 2018)

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa motode penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

a. Menelusuri/mencari (*browsing/searching*)

Dalam proses penulisan, penulis mengumpulkan data dengan cara menjelajahi dunia maya atau internet untuk mengumpulkan sebuah informasi untuk membuat laporan tugas akhir ini.

b. Perpustakaan

Dengan metode pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan data dengan data ke perpustakaan untuk mencari kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di angkat melalui laporan ini.

c. Wawancara

Menurut (Kvale, 1996) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan individu atau kelompok yang memiliki informasi atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai subjek yang sedang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara struktur atau tidak terstruktur.

d. Observasi

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013) Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian sosial atau studi kasus seperti dalam laporan magang ini, observasi biasanya dilakukan dengan cara mengamati perilaku atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan alami tanpa intervensi langsung dari peneliti.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

1.5.1 Waktu

Penulis melakukan kegiatan magang ini saat memasuki semester 6 Program Studi Akuntansi Program Diploma III Universitas Jambi, kegiatan magang ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, dari tanggal 6 Januari s.d 6 Maret 2025.

1.5.2 Tempat Pelaksanaan Magang

Penulis melakukan kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PROVINSI JAMBI.

1.6 Sistematik Penulis

Tujuan dari penulisan sistematik ini untuk memberikan gambaran secara luas dan mudah untuk di mengerti mengenai isi laporan tugas akhir ini, sehingga pembaca dapat melihat secara jelas hubungan antara BAB yang satu dengan BAB yang lain. laporan tugas akhir ini penulis membagi pokok Bahasa menjadi empat BAB, dimana masing-masing BAB terdiri dari subbab dan ringkasan isi setiap bab laporan tugas akhir ini.

BAB I Pendahuluan

pada bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang memilih tema yang diangkat, masalah, tujuan penulisan, metode penulisa, waktu magang, tempat magang, dan sistematis penulisan tugas akhir.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tentang penjelasan yang menjadi landasan dalam laporan ini.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menceritakan struktur organisasi instansi, kedudukan atau posisi jabatan, sejarah instansi, visi dan misi instansi, dan prosedur pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (DPMPTSP) Provinsi Jambi.

BAB IV Penutupan

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pemikiran dan masukan dalam usaha menuju perbaikan.